

Rabu, 28 September 2011

Borneo Tribune

DPRD Sesalkan Lambatnya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2010

Mujidi

Borneo Tribune, Bengkayang

DPRD menyesalkan keterlambatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menyampaikan pertanggungjawaban APBD 2011. Laporan itu baru dibahas pada akhir bulan September. Padahal, dalam aturannya, pertanggungjawaban itu sudah mulai dibahas pada bulan April dan paling lambat bulan Juli pada tahun anggaran berjalan.

"Untuk tahun tahun berikutnya, kami harapkan kepada bupati untuk menyampaikan nota pengantar pertanggungjawaban APBD tepat waktu, karena kalau seperti ini akan mengganggu kinerja DPRD," demikian dikatakan Gusmanto Lingkun juru bicara Fraksi PDIP dalam pandangan akhir fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2010, Senin (26/9) kemarin.

Lingkun menjelaskan, bila saat bulan April nota pengantar itu telah disampaikan maka paling lambat pembahasan pertanggungjawaban tersebut akan selesai pada bulan Juli. Bila bulan Juli selesai, maka selanjutnya DPRD akan terjadwal untuk membahas Raperda lainnya seperti Raperda perubahan tahun berjalan kemudian Raperda APBD tahun selanjutnya.

"Bila keadaannya terlambat seperti ini, maka kerja keras dilakukan, seperti yang terjadi pada tahun ini, DPRD harus bersidang tiga kali dalam sehari," ujar Lingkun.

Tegas Lingkun, dengan keterlambatan pembahasan pada Pertanggungjawaban APBD 2010, maka masyarakat dan LSM akan memberikan penilaian miring dan menganggap pemerintah tidak mampu dalam menjalankan roda pemerintahannya.

"Penilaian miring dari masyarakat itu tidak akan kita dapat bila kita bekerja sesuai dengan aturan," jelas Lingkun lagi.

Yulianus Widodo, juru bicara dari Fraksi Demokrat lebih keras memberikan penilaian. Dia menilai keterlambatan pembahasan Pertanggungjawaban APBD itu merupakan tamparan keras bagi pihak eksekutif dan legislatif. Diharapkan ke depan, keterlambatan ini tidak terjadi lagi. Keterlambatan tersebut juga disesalkan beberapa fraksi lainnya yang ada di DPRD Bengkayang.

Namun demikian, walau DPRD menyesalkan keterlambatan pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2010 tersebut, pada dasarnya para wakil rakyat ini menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2010 itu untuk diketuk palu menjadi Perda. Pandangan akhir tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bengkayang, Sebastianus Darwis dengan dihadiri Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot. □